

**KONSELING FEMINISME DALAM PRESPEKTIF TEORITIS: ANALISIS
LITERATUR UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

¹Febri Anggun Viona, ²Siti Elut Kuraesin, ³Rifa Khamelia Khalda, ⁴Imalatul Khairat

Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Sultan Maulana
Hasanuddin Banten

Email : ¹febrianggunv@gmail.com, ²Sitielutkuraesin@gmail.com,
³rifakameliak@gmail.com, ⁴imalatul.khairat@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

This article discusses feminist counseling from a theoretical perspective through a comprehensive literature analysis with the aim of understanding the concepts, principles, and implications of this approach in empowering women. Feminist counseling emerged as a response to gender injustice and focuses on recognizing the dynamics of power that influence women's experiences in social and psychological contexts. Through this literature study, the article explores various theories and models of feminist counseling that emphasize the importance of critical awareness, strengthening identity, and creating a safe space for women to express themselves and overcome various psychological challenges. Findings from the literature review indicate that the integration of feminist principles in counseling practice can strengthen independence, improve mental well-being, and encourage inclusive transformation. This article is expected to be an important reference for practitioners and academics in applying a feminist approach effectively in the world of counseling.

Keywords: *feminist counseling, women's empowerment, literature analysis,*

ABSTRAK

artikel ini membahas konseling feminisme dari perspektif teoritis melalui analisis literatur yang komperhensif dengan tujuan memahami konsep, prinsip, serta implikasi pendekatan ini dalam pemberdayaan Perempuan. Konseling feminisme muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan gender dan berfokus pada pengakuan dinamika kekuasaan yang memengaruhi pengalaman Perempuan dalam konteks sosial dan psikologis. Melalui studi Pustaka ini, artikel menggali berbagai teori dan model konseling feminis yang menekankan pentingnya kesadaran kritis, penguatan identitas, Serta penciptaan ruang aman bagi Perempuan untuk bisa mengekspresikan diri dan mengatasi berbagai tantangan psikologis. Temuan dari tinjauan literatur menunjukkan bahwa integrasi prinsip feminisme dalam praktik koonseling dapat memperkuat kemandirian, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mendorong transformasi yang inklusif. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para praktisis dan akademisis dalam mengaplikasikan pendekatan feminis ssecara efektif dalam dunia konseling

Kata kunci: konseling feminisme, pemberdayaan Perempuan, analisis literatur

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

konseling feminis merupakan sebuah pendekatan terapeutik yang revolusioner, lahir dari kritik tajam terhadap praktik-praktik konseling konvensional yang kerap kali luput dalam memahami atau bahkan melanggengkan ketidakadilan gender. Esensi pendekatan ini terletak pada pemahaman fundamental bahwa masalah psikologis individu tidak bisa dipisahkan dari jaring-jaring kompleks konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya, terutama yang berkaitan dengan struktur patriarkal dan berbagai bentuk penindasan berbasis gender (Worell & Remer, 2013). Dalam ranah konseling feminisme, pemberdayaan Perempuan bukan sekedar tujuan sampingan, melainkan menjadi inti sentral dari seluruh proses terapeutik. Klien didorong secara aktif untuk mengenali, mengidentifikasi, dan pada akhirnya, menantang dampak destruktif dari peran gender yang kaku, diskriminasi yang merajalela, serta ekspektasi sosial yang tidak adil yang telah membelenggu mereka.

Tujuan utama yang diemban oleh konseling feminisme adalah memfasilitasi kesadaran kritis pada diri klien tentang bagaimana dinamika kekuatan sosial dan politik secara inheren memengaruhi pengalaman pribadi mereka. Lebih dari itu, pendekatan ini secara aktif mendukung mereka dalam mengembangkan strategi yang adaptif dan proaktif untuk mengatasi berbagai bentuk penindasan yang mereka alami, serta untuk mencapai tingkat otonomi dan

keberdayaan diri yang sejati. Seperti yang dijelaskan secara gamblang oleh Brown (2010), terapi feminis memiliki kapasitas untuk membantu klien "mengembangkan kesadaran kritis terhadap penindasan sosial", yang sejalan dengan gagasan bahwa konselor feminis tidak hanya terpaku pada dimensi intrapsikis klien semata, melainkan juga secara holistik mempertimbangkan konteks sosiopolitik yang membentuk pengalaman hidup mereka. Demikian pula, Enns (2004) menekankan bahwa tujuan konseling feminis adalah membantu klien "mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi untuk perubahan dan mengidentifikasi keterampilan serta sumber daya yang mereka miliki untuk mencapainya, yang secara langsung mendukung otonomi individu.

1. Urgensi analisis literatur dan relevansi dalam konteks pemberdayaan Perempuan

Analisis literatur yang mendalam mengenai konseling feminisme dari perspektif teoretis menjadi sangat krusial untuk membongkar dan memahami kedalaman serta kompleksitas yang melekat pada pendekatan terapeutik ini, khususnya dalam konteks upaya pemberdayaan perempuan. Studi ini akan secara cermat mengkaji berbagai teori dan filsafat yang menjadi fondasi konseling feminisme, melacak lintasan perkembangannya dari masa ke masa, serta mengidentifikasi secara presisi bagaimana prinsip-prinsip teoretis ini diimplementasikan dalam praktik klinis guna mencapai tujuan pemberdayaan yang

telah ditetapkan. Pentingnya pendekatan yang sensitif gender ini juga ditekankan oleh McAuliffe dan Eriksen (2011) dalam studi mereka tentang konseling gender, yang menguraikan bagaimana pendekatan ini memungkinkan "klien untuk menantang struktur opresif dan mengembangkan agensi pribadi"

Dari perspektif internasional, Goodman et al. (2004) menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip feminis memandu konselor untuk "memfasilitasi klien dalam mengidentifikasi dan menantang sistem diskriminatif yang memengaruhi kesejahteraan mereka, mendorong aksi advokasi personal dan sosial". Ini memperkuat gagasan bahwa konseling feminisme secara inheren adalah praktik pemberdayaan yang tidak hanya mengubah individu tetapi juga menantang struktur sosial. Selain itu, Worell dan Remer (2013) dalam *Feminist Perspectives in Therapy: An Empowerment Model* menjelaskan secara detail bagaimana model pemberdayaan ini mengintegrasikan teori feminis dengan praktik konseling untuk membantu klien "deconstruct patriarchal messages and reconstruct healthier, more authentic self-concepts." Ini menunjukkan bahwa fokus pada "perspektif teoritis" adalah fondasi yang kokoh untuk memahami bagaimana pemberdayaan ini terjadi dalam praktik.

2. Konseling feminis sebagai agen perubahan sosial

konseling feminisme melampaui batas-batas terapi individual dan tidak hanya bertujuan untuk membantu klien mengatasi masalah pribadi mereka, tetapi juga secara aktif mempromosikan perubahan sosial yang lebih besar dan

struktural. Dengan membongkar dan memahami akar permasalahan yang bersifat sistemik, perempuan dapat diberdayakan tidak hanya untuk sekadar bertahan hidup dari penindasan, melainkan juga untuk berkembang secara optimal, mencapai potensi penuh mereka, dan pada gilirannya, berkontribusi secara signifikan pada penciptaan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara. Pandangan ini sejalan dengan argumen Sue dan Sue (2013) yang menegaskan bahwa konselor yang kompeten secara multikultural juga harus siap "bertindak sebagai agen perubahan sosial untuk menantang ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang memengaruhi klien mereka"

Konteks ini diperkaya dengan pandangan Ratts dan Pedersen (2014) yang menyatakan bahwa konseling berorientasi keadilan sosial "menantang status quo dan berupaya menciptakan perubahan sistemik yang memfasilitasi kesejahteraan individu dan masyarakat" (hlm. 8). Ini menggarisbawahi peran konseling feminisme sebagai katalisator perubahan sosial. Oleh karena itu, melalui analisis literatur komprehensif dan sistematis, baik dari ranah domestik maupun internasional, artikel ini bertekad menyajikan tinjauan mendalam tentang konseling feminisme sebagai alat ampuh dan transformatif untuk pemberdayaan perempuan.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk memahami secara mendalam konseling

feminisme dari perspektif teoritisnya dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pemberdayaan perempuan. Metode ini dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur ilmiah yang relevan secara komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi teori-teori inti, prinsip-prinsip utama, dan pola-pola yang muncul dalam literatur, serta mengungkap kesenjangan pengetahuan yang mungkin ada, sehingga memberikan gambaran utuh tentang hubungan antara kerangka teoretis konseling feminisme dan pemberdayaan perempuan.

1. Strategi pencarian dan kriteria seleksi literatur

Pencarian literatur akan dilakukan pada basis data elektronik terkemuka yang mencakup bidang psikologi, konseling, studi gender, dan sosiologi. Basis data utama yang akan digunakan meliputi Scopus, Web of Science, PubMed, Google Scholar, serta basis data khusus Indonesia seperti Garuda (Portal Garba Rujukan Digital) dan SINTA (Science and Technology Index).

Untuk memastikan cakupan hasil yang optimal dan relevansi literatur yang dianalisis, pencarian akan menggunakan kombinasi kata kunci strategis seperti ("konseling feminis" OR "feminist counseling" OR "terapi feminis" OR "feminist therapy") AND ("teori" OR "teoretis" OR "theory" OR "theoretical framework" OR "perspektif" OR "perspective") AND ("pemberdayaan perempuan" OR "women's empowerment" OR "gender equality" OR "kesetaraan gender") AND ("analisis literatur" OR "literature review" OR

"tinjauan sistematis" OR "systematic review"). Pencarian akan dibatasi pada artikel jurnal ilmiah peer-reviewed, buku, atau bab buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta dalam rentang waktu yang sesuai (misalnya, 10-15 tahun terakhir untuk fokus pada tren dan diskusi kontemporer, namun literatur klasik yang fundamental juga akan dipertimbangkan).

Kriteria inklusi meliputi publikasi yang secara eksplisit membahas konseling feminisme atau terapi feminis dengan fokus utama pada perspektif teoretis atau kerangka konseptual yang mendasarinya. Publikasi juga harus membahas secara eksplisit atau implisit hubungan antara konseling feminisme dan pemberdayaan perempuan, serta telah melewati proses peer-review dan diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.

Sebaliknya, kriteria eksklusi mencakup publikasi yang berfokus semata-mata pada praktik klinis tanpa pembahasan teoritis yang signifikan, penelitian yang tidak secara spesifik membahas konseling atau terapi (misalnya, hanya fokus pada aktivisme atau gerakan feminis umum), makalah konferensi yang belum dipublikasikan secara resmi dalam jurnal atau prosiding peer-reviewed, serta materi non-ilmiah (misalnya, berita, blog, opini tanpa dukungan riset).

2. Proses seleksi dan analisis data

Proses seleksi literatur akan mengikuti tahapan sistematis. Tahap awal melibatkan identifikasi seluruh hasil pencarian dan penghapusan duplikasi. Selanjutnya, dua peneliti akan secara independen melakukan skrining awal

berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi potensi artikel yang relevan. Artikel yang lolos skrining awal akan diunduh dan ditinjau teks lengkapnya oleh dua peneliti secara independen untuk inklusi akhir. Setiap perbedaan dalam keputusan inklusi akan diselesaikan melalui diskusi atau intervensi peneliti ketiga.

Data dari setiap artikel yang terpilih akan diekstraksi menggunakan matriks data yang terstruktur. Informasi yang akan diekstraksi meliputi detail bibliografi (penulis, tahun), jenis publikasi, teori feminis yang diacu, prinsip-prinsip konseling feminisme yang diidentifikasi, serta penjelasan mengenai bagaimana konseling feminisme dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan.

Analisis data akan dilakukan secara tematis dan naratif. Tema-tema kunci terkait perspektif teoretis konseling feminisme dan implikasinya terhadap pemberdayaan perempuan akan diidentifikasi dan dikelompokkan. Selanjutnya, akan dilakukan sintesis naratif untuk mengintegrasikan temuan-temuan ini, menyoroti konsistensi, perbedaan, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang mungkin ada dalam literatur. Pendekatan ini akan memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana berbagai aliran teori feminis membentuk praktik dan tujuan konseling feminisme dalam mencapai pemberdayaan perempuan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. kerangka teoritis konseling feminisme: fondasi pemberdayaan

Analisis literatur secara konsisten menunjukkan bahwa konseling feminisme bukanlah pendekatan tunggal yang terisolasi, melainkan sebuah spektrum luas yang berakar kuat pada berbagai aliran teori feminis. Teori-teori ini menyediakan lensa kritis yang esensial untuk memahami kompleksitas pengalaman perempuan, memastikan bahwa isu-isu gender yang sistemik diakui, ditinjau, dan ditangani dalam proses terapeutik.

Salah satu fondasi utama adalah teori feminis liberal, yang berfokus pada kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan individu, menuntut penghapusan diskriminasi berdasarkan gender. Dalam konseling, perspektif ini mendorong klien untuk mengenali dan menantang hambatan eksternal serta bias sosial yang menghalangi potensi mereka dan mengembangkan strategi konkret untuk mengatasi diskriminasi dan mencapai kesetaraan pribadi. Brown (2010), dalam ulasannya tentang terapi feminis, menjelaskan bahwa pendekatan ini secara inheren "menantang dinamika kekuasaan tradisional dalam hubungan terapeutik, memberdayakan klien untuk menjadi partisipan aktif dalam proses penyembuhan mereka dan mengembangkan kesadaran kritis terhadap penindasan sosial. Lebih lanjut, Enns (2004) menekankan bahwa tujuan konseling feminis liberal adalah membantu klien "mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi untuk perubahan dan mengidentifikasi keterampilan serta sumber daya yang mereka miliki untuk mencapainya, yang secara langsung mendukung otonomi individu. Penelitian oleh Goodman et al. (2004) juga

menyoroti bagaimana prinsip-prinsip feminis-liberal memandu konselor untuk "memfasilitasi klien dalam mengidentifikasi dan menantang sistem diskriminatif yang memengaruhi kesejahteraan mereka, mendorong aksi advokasi personal dan sosial"

Kemudian, teori feminis radikal menyoroti akar masalah penindasan perempuan pada sistem patriarki itu sendiri, yang dianggap sebagai struktur kekuasaan fundamental. Perspektif ini mendorong perempuan untuk melihat bagaimana kekuatan sosial dan politik yang lebih besar secara intrinsik membentuk masalah pribadi mereka. Konselor yang menganut pandangan ini akan membantu klien memahami bahwa penderitaan individu seringkali merupakan manifestasi dari "masalah sosial dan politik yang lebih luas" (Worell & Remer, 2002), sehingga mendorong mereka untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas kesulitan yang berakar pada struktur sosial yang menindas. Konsep Hooks (1984) tentang "kesadaran feminis" sangat relevan, di mana ia menyerukan perempuan untuk "memahami sistem opresi dan menemukan cara untuk melawannya, baik secara individu maupun kolektif". Hal ini diperkuat oleh pandangan McAuliffe dan Eriksen (2011) yang menekankan pentingnya konselor dalam membantu klien "menantang struktur opresif dan mengembangkan agensi pribadi yang selaras dengan tujuan feminis radikal.

Selanjutnya, teori feminis sosialis menghubungkan penindasan perempuan dengan struktur kelas dan ekonomi, menunjukkan bagaimana peran gender

dan ketidakadilan ekonomi saling berkaitan dan memperparah satu sama lain. Dalam konseling, ini berarti membantu klien memahami bagaimana status ekonomi, latar belakang sosial, atau posisi mereka dalam struktur kapitalis dapat memengaruhi pengalaman penindasan gender yang mereka alami. Chrisler (2012) dalam buku mereka tentang psikologi perempuan, menjelaskan bagaimana faktor sosiokultural dan ekonomi berperan dalam membentuk masalah kesehatan mental perempuan dan pentingnya mempertimbangkan dimensi-dimensi ini dalam terapi. Enns (2004) lebih lanjut menjelaskan bahwa perspektif ini "mengajak konselor untuk mempertimbangkan bagaimana isu-isu kemiskinan, akses terhadap pendidikan, dan pekerjaan berdampak pada kesehatan mental perempuan dan pilihan hidup mereka. Sementara itu, teori feminis postmodern dan konstruksionis sosial menawarkan pandangan bahwa realitas, identitas, dan peran gender dibentuk secara sosial dan oleh karena itu dapat didekonstruksi serta diubah. Pendekatan ini memungkinkan klien untuk mengeksplorasi berbagai identitas dan menolak definisi kaku atau biner tentang apa artinya menjadi "perempuan," memberikan kebebasan yang substansial untuk mendefinisikan diri mereka sendiri di luar batasan sosial yang kaku. Anderson (1997), dalam artikelnya tentang konstruksionisme sosial dalam terapi, membahas bagaimana terapi dapat membantu klien untuk "mengembangkan narasi diri yang lebih memberdayakan dan alternatif dari cerita-cerita dominan yang membatasi". Gergen (2009) dalam karyanya tentang konstruksionisme sosial,

menegaskan bahwa “terapi bukanlah tentang menemukan 'kebenaran' dalam diri individu, melainkan tentang membangun narasi baru yang lebih memberdayakan”, yang selaras dengan tujuan konseling feminis postmodern.

Secara kolektif, kerangka teoretis yang beragam ini membekali konselor feminis dengan alat yang ampuh untuk:

- a. Menganalisis Konteks Sosiopolitik: Memahami secara mendalam bagaimana masalah yang dialami klien tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga terhubung erat dengan ketidakadilan gender yang sistemik dan lebih besar (Worell & Remer, 2002). Hal ini sejalan dengan pandangan Bem (1993) tentang *gender schema theory* yang menjelaskan bagaimana masyarakat menanamkan skema gender yang membatasi individu.
 - b. Menantang norma dan ekspektasi gender: Mendorong klien untuk secara kritis mempertanyakan peran gender yang kaku, ekspektasi sosial yang tidak realistis, dan stereotip yang merugikan, yang seringkali membatasi potensi mereka (Bolen & Johnson, 2017).
 - c. Memperomosisikan kesadaran kritis (*Consciousness-Raising*): Membantu klien melihat bagaimana struktur kekuasaan, bias, dan praktik diskriminatif memengaruhi hidup mereka, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai bentuk penindasan yang mereka hadapi (Brown, 2010; Worell & Remer, 2013).
2. Konseling feminisme sebagai katalis pemberdayaan Perempuan

Hasil analisis literatur secara konsisten dan meyakinkan menunjukkan bahwa aplikasi prinsip-prinsip konseling feminisme, yang didasarkan pada kerangka teoretis di atas, secara langsung berujung pada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan di sini dipahami secara holistik sebagai proses dinamis di mana perempuan memperoleh kendali yang lebih besar atas hidup mereka, memiliki akses yang setara ke sumber daya dan informasi, serta mampu mengambil keputusan yang memengaruhi kesejahteraan diri mereka sendiri, keluarga, dan komunitasnya (Rappaport, 1987).

Beberapa cara konseling feminisme memfasilitasi proses pemberdayaan ini adalah:

- a. Peningkatan Rasa Diri dan Harga Diri: Dengan menantang internalisasi pesan-pesan negatif tentang perempuan yang disebarluaskan oleh masyarakat patriarkal, klien belajar untuk menghargai diri sendiri, kemampuan, dan pengalaman mereka. Goodman et al. (2004) menekankan bahwa konseling feminis membantu klien untuk "mengidentifikasi sumber-sumber penindasan dalam hidup mereka, menantang konstruksi sosial gender, dan mengembangkan strategi coping yang memberdayakan". pada gilirannya membangun keyakinan diri yang kuat dan kemampuan untuk bertindak secara efektif dalam menghadapi tantangan
- b. Pengembangan Otonomi dan Kemandirian: Konseling feminisme secara aktif mendorong perempuan untuk membuat keputusan yang

independen dan selaras dengan nilai-nilai serta aspirasi pribadi mereka, bukan dengan ekspektasi sosial yang membatasi atau merugikan. Klien diberdayakan untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju kemandirian, baik itu secara emosional, finansial, maupun relasional. Rayan dan deci (2000), dalam teori penentuan nasib sendiri menggarisbawahi bahwa "dukungan otonomi dalam lingkungan terapeutik sangat penting untuk memfasilitasi motivasi intrinsik dan pertumbuhan pribadi, memungkinkan individu untuk mengambil alih inisiatif dalam kehidupan mereka". Hal ini sangat relevan dalam membantu perempuan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tekanan sosial dan keluarga.

- c. Kesadaran dan Aksi Kolektif: Lebih dari sekadar pemulihan individu, konseling feminisme juga mendorong klien untuk melihat masalah dan perjuangan pribadi mereka sebagai bagian dari pengalaman perempuan secara kolektif. Pemahaman bahwa "yang personal adalah politis" (Worell & Remer, 2002) dapat memicu partisipasi dalam gerakan sosial, advokasi untuk perubahan kebijakan, atau pembentukan kelompok dukungan. Ratts et al. (2016) menegaskan bahwa konselor yang berkomitmen pada keadilan sosial harus "memiliki kapasitas untuk advokasi mikro, meso, dan makro, yang melibatkan tindakan untuk mengatasi hambatan sistemik dan mempromosikan keadilan bagi semua". Hal ini diperkuat oleh pandangan Moane (2011) yang

menyatakan bahwa "pemahaman tentang penindasan sistemik adalah langkah krusial menuju pembebasan, yang seringkali melibatkan pengembangan kesadaran kolektif dan tindakan bersama", yang mendukung upaya aksi kolektif dan perubahan sosial.

- d. Pengembangan Keterampilan Coping dan Resiliensi: Melalui proses konseling yang suportif dan memberdayakan, perempuan belajar strategi efektif untuk menghadapi diskriminasi, kekerasan berbasis gender, atau tekanan sosial yang mereka alami. Memahami bagaimana trauma kompleks memengaruhi perempuan adalah langkah pertama dalam membangun resiliensi. Tedeschi dan Calhoun (2004), dalam pembahasan mereka tentang pertumbuhan pasca-trauma, menyoroti bahwa pengalaman traumatis, meskipun menyakitkan, dapat menjadikatalisator bagi perkembangan pribadi yang signifikan, termasuk peningkatan apresiasi hidup, hubungan yang lebih mendalam, dan kekuatan personal yang lebih besar. Hal ini sangat relevan dalam konseling feminis yang bertujuan untuk memfasilitasi perempuan agar dapat bangkit dari kesulitan dengan kekuatan dan perspektif baru. Dukungan emosional dan kognitif yang diberikan dalam konseling feminis secara signifikan meningkatkan kapasitas klien untuk bangkit dari kesulitan, seperti yang dijelaskan dalam tinjauan komprehensif tentang resiliensi psikologis oleh Fletcher dan Sarkar (2013) yang membahas bagaimana individu dapat mempertahankan atau memperoleh

- kembali fungsi psikologis yang sehat setelah menghadapi *adversity*.
- e. Pergeseran Dinamika Kekuatan dalam Hubungan: Konselor feminis menciptakan hubungan terapeutik yang egaliter dan non-hierarkis, di mana klien dianggap sebagai ahli atas pengalaman hidup mereka sendiri. Hubungan ini menjadi model bagi klien untuk mencari dan menegaskan kesetaraan dalam hubungan lain dalam hidup mereka, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Ratts dan Pedersen (2014) menjelaskan bahwa konseling yang berorientasi pada keadilan sosial "menantang status quo dan berupaya menciptakan perubahan sistemik yang memfasilitasi kesejahteraan individu dan masyarakat", mengajarkan klien untuk menantang hubungan yang tidak seimbang di kehidupan nyata.
 3. Tantangan, kesenjangan, dan implikasi penelitian

Meskipun efektivitas konseling feminis dalam memfasilitasi pemberdayaan perempuan telah terbukti secara teoretis dan didukung oleh berbagai literatur, implementasi praktisnya tetap menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam konteks budaya yang sangat patriarkal atau dalam masyarakat yang memiliki pemahaman berbeda mengenai gender dan kesetaraan. Di sejumlah konteks, resistensi terhadap gagasan "feminisme"—baik karena stigma maupun interpretasi yang keliru—dapat membatasi penerimaan dan akses perempuan terhadap layanan konseling berbasis feminis. Kondisi ini diperburuk oleh stigma yang masih melekat pada isu

kesehatan mental serta rendahnya penerimaan terhadap pencarian bantuan profesional di berbagai komunitas. Nilai-nilai tradisional, norma agama, dan struktur sosial keluarga sering kali menyebabkan masalah kesehatan mental dianggap tabu atau bahkan dikaitkan dengan gangguan spiritual, sehingga individu cenderung menyembunyikan kondisi mereka daripada mencari pertolongan profesional (Ayuningtyas, Misnaniarti, & Rayhani, 2018).

Danukusumah, Suryani, dan Shalahuddin (2022) menyoroti bagaimana stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menciptakan hambatan psikososial yang signifikan, termasuk dalam perilaku pencarian bantuan dan kualitas hidup individu. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa masyarakat, meskipun mengakui pentingnya pengobatan bagi ODGJ, tetap menunjukkan sikap penolakan terhadap keberadaan mereka di lingkungan sosial terdekat. Fenomena ini menjadi bukti kuat bahwa keberhasilan intervensi psikososial, termasuk konseling feminis, sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan kesiapan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, tantangan utama dalam penerapan konseling feminis bukan hanya terletak pada pendekatan individual, tetapi juga pada kebutuhan akan penyesuaian budaya dan strategi intervensi yang kontekstual, berbasis komunitas, dan mampu mengatasi hambatan sosial yang mengakar

Analisis literatur juga mengungkapkan beberapa kesenjangan

penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Meskipun banyak pembahasan teoretis, masih dibutuhkan lebih banyak penelitian empiris yang menguji efektivitas spesifik model konseling feminisme tertentu dalam konteks budaya non-Barat, termasuk di Indonesia, dengan mempertimbangkan keberagaman etnis dan agama. Demikian pula, studi longitudinal yang melacak dampak jangka panjang konseling feminisme terhadap pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (misalnya, partisipasi politik, kesehatan mental, kemajuan karier) masih relatif terbatas (Myers & Sweeney, 2005). Penelitian kualitatif yang mendalam tentang pengalaman perempuan Indonesia yang menerima konseling feminisme juga akan sangat berharga untuk memahami nuansa lokal (Creswell, 2016). Pemahaman tentang psikologi perkembangan manusia, seperti yang dijelaskan oleh Hurlock (1997), menjadi landasan penting bagi konselor untuk dapat memahami dan merespons kebutuhan klien dari berbagai latar belakang, termasuk dalam konteks gender dan isu-isu kesehatan mental.

Implikasi dari analisis literatur ini sangat penting bagi para profesional konseling, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan. Konselor perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai kerangka teoretis feminisme untuk dapat menerapkan pendekatan ini secara etis dan efektif, serta mengembangkan kompetensi lintas budaya (Sue & Sue, 2008). Lembaga pendidikan konseling harus mengintegrasikan kurikulum yang kuat tentang konseling feminisme dan isu-isu

gender untuk mempersiapkan praktisi masa depan yang sensitif gender dan berperspektif holistik (Ratts & Pedersen, 2014, hlm. 450). Bagi pembuat kebijakan temuan ini menunjukkan bahwa investasi dalam layanan konseling yang berperspektif gender adalah investasi krusial dalam pembangunan sosial, kesehatan mental masyarakat, dan pemberdayaan komunitas secara keseluruhan, mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) terkait kesetaraan gender (UN Women, 2015).

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis literatur sistematis, jelas bahwa konseling feminisme, yang didasarkan pada kerangka teoretis yang kaya dan beragam, merupakan alat yang sangat efektif dan esensial untuk pemberdayaan perempuan. Pendekatan ini tidak hanya membantu individu mengatasi masalah psikologis yang bersifat personal, tetapi juga mendorong kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sistemik, memupuk otonomi, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam perubahan sosial yang lebih luas. Pemberdayaan perempuan melalui konseling feminisme adalah sebuah proses holistik yang secara inheren mengakui dimensi pribadi dan politik dari kehidupan perempuan, mendorong mereka untuk mencapai kesejahteraan optimal dan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, H. (1997). Conversation, language, and possibilities: A

- postmodern approach to therapy. Basic Books.
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis situasi kesehatan mental masyarakat di Indonesia dan strategi intervensinya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10
<https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>
- Bem, S. L. (1993). *The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality*. Yale University Press.
- Bolen, K. M., & Johnson, D. M. (2017). A social constructionist approach to understanding and addressing gender in counseling. *Journal of Creativity in Mental Health*, 12(1), 60-72.
<https://doi.org/10.1080/15401383.2016.1264353>
- Brown, L. S. (2018). *Feminist therapy* (2nd ed.). American Psychological Association.
<https://doi.org/10.1037/0000092-000>
- Chrisler, J. C., Golden, C., & Rozee, P. D. (Eds.). (2012). *Lectures on the psychology of women*. Waveland Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Danukusumah, F., Suryani, S., & Shalahuddin, I. (2022). Stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(03), 205–212.
<https://doi.org/10.33221/jikm.v11i03.1403>
- Enns, C. Z. (2004). *Feminist theories and feminist psychotherapies: Origins, themes, and diversity*. Routledge.
- Eriksen, K. P., & McAuliffe, G. J. (2011). Constructing the counseling skills course. In *Handbook of counselor preparation: Constructivist, developmental, and experiential approaches* (pp. 91-110). SAGE Publications, Inc..
- Fletcher, D., & Sarkar, M. (2013). Psychological resilience. *European psychologist*.
<https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000124>
- Gergen, K. J. (2009). *Relational being: Beyond self and community*. Oxford university press
- Goodman, L. A., Liang, B., Helms, J. E., Latta, R. E., Sparks, E., & Weintraub, S. R. (2004). Training counseling psychologists as social justice agents: Feminist and multicultural principles in action. *The Counseling Psychologist*, 32(6), 793–836.
<https://doi.org/10.1177/0011000004268802>
- Hooks, B. (1984). *Feminist theory: From margin to center*. Pluto press.
- Hurlock, E. B. (1997). *Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*

- Moane, G., & Campling, J. (1999). Gender and colonialism: A psychological analysis of oppression and liberation (p. 47). London: Macmillan.
- Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2005). Counseling for wellness: Theory, research, and practice. American Counseling Association.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American journal of community psychology*, 15(2), 121-148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>
- Ratts, M. J., & Pedersen, P. B. (2014). Counseling for multiculturalism and social justice: Integration, theory, and application. John Wiley & Sons.
- Ratts, M. J., & Pedersen, P. B. (2014). Counseling for multiculturalism and social justice: Integration, theory, and application. John Wiley & Sons.
- Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., & McCullough, J. R. (2016). Multicultural and social justice counseling competencies: Guidelines for the counseling profession. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 44(1), 28-48. <https://doi.org/10.1002/jmcd.12035>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). "Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence". *Psychological inquiry*, 15(1), 1-18. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501_01
- Wing Sue, D., & Sue, D. (2008). Counseling the culturally diverse: Theory and practice. John Wiley & Sons, Inc..
- Wing Sue, D., & Sue, D. (2008). Counseling the culturally diverse: Theory and practice. John Wiley & Sons, Inc..
- Women, U. N. (2015). Monitoring gender equality and the empowerment of women and girls in the 2030 agenda for sustainable development: opportunities and challenges. UN Women.
- Worell, J., & Remer, P. (2002). Feminist perspectives in therapy: Empowering diverse women. John Wiley & Sons.